

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membicarakan tentang tatanan global, Konsep hegemoni mengacu pada kepemimpinan internasional oleh satu subjek politik terhadap pihak lain yang lebih lemah dan kurang kuat (negara/kelas).¹ Teori stabilitas hegemoni menjelaskan bagaimana dengan keberadaan kekuatan hegemonik, kestabilan tatanan dari struktur ekonomi dan politik global akan dapat lebih terjamin, ketika kekuatan hegemonik ini menggunakan kekuatannya untuk mendesak mereka yang lebih lemah untuk mematuhi peraturan atau cara main yang ada. Teori ini secara khusus menjadi penjelasan yang paling diterima secara luas untuk menjelaskan evolusi peran khusus Amerika Serikat dalam struktur global setelah 1945.² Hegemoni AS di kancah global telah mengalami pasang surutnya dalam beberapa dekade terakhir. Khususnya pasca perang dunia kedua, AS berhasil mendapatkan momentumnya dalam menjadi salah satu hegemon terbesar – bersama dengan Uni Soviet. Pada masa ini, AS berhasil untuk, tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi yang dominan dengan ekonomi kapitalisnya yang sangat maju, namun juga dalam menjalankan kekuasaan politiknya atas semua negara kapitalis. Sebagai salah

¹ Richard Saull. "Hegemony and the Global Political Economy" *Oxford University Press* (2017): 3. doi: 10.1093/acrefore/9780190846626.013.208

² Ibid, 3.

satu dari strategi hegemoni nya, di bawah apa yang disebut sebagai “proyek modernisasi yang dipimpin AS”, sekelompok negara di Asia berhasil diubah menjadi negara kapitalis modern setelah Perang Dunia II. Upayanya di wilayah Asia Timur ini, sebetulnya berpusat pada kepentingan keamanan AS melawan rezim komunis antara tahun 1940-an dan 1970-an – secara khusus Korea Selatan. Tidak hanya dalam perihal ekonomi, hubungannya dalam bidang keamanan, dengan demikian, akhirnya menciptakan sebuah hubungan ketergantungan diantara kedua negara, yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan dari lawannya.³

Sentimen *Anti Americanism* di Korea Selatan bukanlah sebuah fenomena yang baru. Terlepas dari fakta bahwa Korea Selatan merupakan salah satu sekutu terdekat dari Amerika Serikat (AS) - dengan menjalin hubungan diplomatik dari sejak tahun 1882 di masa kerajaan Joseon, melalui *Treaty of Peace, Amity, Commerce, and Navigation*,⁴ benih-benih dari sentimen ini bahkan dapat ditemui jauh dari sebelum Korea berpisah di tahun 1948. Walaupun keberadaan dari sentimen tidak terlalu mempengaruhi hubungan kerja sama antara kedua negara, namun, menarik untuk melihat bahwa terdapat segmentasi masyarakat yang menunjukkan kebenciannya terhadap negara yang notabeneanya telah “menyelamatkan” atau “memberikan

³ Min Hua Chiang, “The US Hegemony, East Asia and Global Governance,” *Bandung J of Global South* 2, No. 9 (2015): 1–13. doi: 10.1186/s40728-015-0023-9

⁴ U.S. Department of State. “U.S. Relations With the Republic of Korea.” <https://www.state.gov/u-s-relations-with-the-republic-of-korea/> (Diakses 22 Februari, 2022)

kebebasan” bagi Korea Selatan saat perang Korea terjadi pada tahun 1950 hingga 1953.⁵

Relasi antara AS dan Korea - khususnya Korea Selatan, makin mendalam setelah berakhirnya perang dunia dua, saat peninsula Korea terbagi menjadi dua daerah okupasi - Korea Selatan yang dikuasai AS dan Korea Utara yang dikuasai Uni Soviet. Hubungan ini pun telah membantu Korea Selatan dari invasi Korea Utara pada tahun 1950,⁶ sehingga akhirnya Korea Selatan - yang pada saat itu umurnya masih muda pasca liberasi dari Jepang, dapat berdiri sendiri menjadi sebuah negara yang utuh dan merdeka sepenuhnya. Penandatanganan *Mutual Defense Treaty* (Perjanjian Pertahanan Bersama) antara AS dan Korea Selatan di tahun 1953 juga menandakan awal dari kerja sama militer antara kedua negara, yang mana nantinya Amerika Serikat akan mempertahankan kehadiran militernya di Korea dengan pasukan darat, udara, dan angkatan laut di dalam dan di sekitar negara itu. Berbagai alasan diberikan oleh pemerintahan AS terkait keberadaan militer di tanah Korea Selatan ini, mulai dari untuk memberikan perlindungan untuk pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang berkelanjutan, menunjukkan ketertarikan dan dukungan AS dalam keseluruhan stabilitas Korea Selatan

⁵ *Ibid*

⁶ Lee Ji Young. “4 things to know about North and South Korea.” *The Conversation*. <https://theconversation.com/4-things-to-know-about-north-and-south-korea-80583>. (Diakses 22 Februari, 2022)

dan Asia Timur, hingga demi mencegah tindakan militer sepihak dari Korea Selatan.⁷

Dalam perkembangan Korea Selatan menjadi sebuah salah satu bangsa paling maju di Asia - menjadi salah satu negara yang dijuluki “Macan Asia”, memiliki tingkat industrialisasi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat - dan bahkan dunia - menempati posisi ke-23 secara global dalam perhitungan indeks demokrasi,⁸ banyak rintangan yang harus dihadapinya untuk dapat berada di posisi ini. Salah satu peristiwa signifikan dalam membentuk sejarah modern Korea Selatan, yang juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan demokrasinya, adalah peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 (광주 민주화 항쟁). Peristiwa bersejarah, yang berhasil masuk ke dalam UNESCO “The Memory of the World program”⁹ ini menjadi sebuah momentum perjuangan masyarakat Korea Selatan untuk mewujudkan demokratisasi di negaranya, serta membebaskan rakyat dari pengekangan dan penindasan yang telah dilakukan oleh pemerintahan militer pada saat itu, Chun Doo Hwan. Chun Doo Hwan merupakan seorang kepala Komando Pertahanan Keamanan pada masa

⁷ Bae Ho Hanh. “The Korean-American Alliance: Its Evolution, Transition, and Future Prospects.” *Asian Perspective* Vol. 7 No. 2 (Musim Semi- Dingin 1983): 175-209. <https://www.jstor.org/stable/43738007>.

⁸ KOREA. “Korea regains 'full democracy' status in int'l index.” <https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=194690>. (Diakses 22 Februari, 2022)

⁹ Jo Jung Eun. “UNESCO to list Gwangju Uprising records as world heritage.” *The Korean Herald*. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20110524000557> (Diakses 23 Februari, 2022)

kepresidenan Park Chung Hee¹⁰ - yang dibunuh oleh Kim Jae Kyu, direktur Badan Intelijen Korea Selatan pada saat itu. Usai runtuhnya rezim Park Chung Hee, Chun Doo Hwan lalu membentuk “New Military Group” dan menjalankan kudeta pada 12 Desember 1979, yang bertujuan untuk memperluas pengaruh pemerintahan militer dalam negara. Pada saat inilah, reaksi negatif dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari politisi, pemuka agama, mahasiswa, dan pekerja, mulai bermunculan, dan penyeruan terhadap demokrasi, penarikan darurat militer, dan pelepasan sistem *Yushin*¹¹- sistem pemerintahan pada rezim Park Chung Hee yang memberikannya kekuasaan untuk memerintah tanpa adanya *check and balances* dari legislatif dan yudikatif, serta secara de facto, memberikannya posisi kepresidenan seumur hidup- untuk segera dilakukan.¹² Walaupun demikian, perjuangan ini tidak berjalan dengan mudah. Dengan keberadaan militer di pihak pemerintah, masyarakat menjadi sulit untuk meraih tujuan mereka terhadap demokratisasi. Mahasiswa yang turun ke jalan mengalami penindasan dan masyarakat yang turut menunjukkan dukungannya justru mengalami penganiayaan oleh pihak berwenang, atau ditangkap. Puncaknya di tanggal 27 Mei saat pemerintah melaksanakan ‘Operasi Sangmu Chung Jung’ yang menindas secara paksa warga GwangJu. Dalam peristiwa yang berlangsung

¹⁰ James E. Hoare. “Biographies: Chun Doo Hwan.” Wilson Center Digital Archive. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/resource/modern-korean-history-portal/chun-doo-hwan>. (Diakses 22 Februari, 2022)

¹¹ Gwangju Metropolitan City. “Mei 18th Democratic Uprising.” <https://www.gwangju.go.kr/eng/contentsView.do?pageId=eng9>. (Diakses 22 Februari, 2022)

¹² Hyug Baeg Im. "Chapter Eight. The Origins of the Yushin Regime: Machiavelli Unveiled." dalam *The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea*. (Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2011.), 233-262

selama 10 hari ini, dimulai dari tanggal 18 Mei hingga berakhir di 27 Mei, banyak korban berjatuhan. Pada data yang diperoleh tahun 2018, terhitung ada 5807 korban yang tercatat dalam peristiwa berdarah ini.¹³ Walaupun gerakan ini masih belum bisa disebut sebuah gerakan yang sukses, namun peristiwa inilah yang mendorong dan memotivasi gerakan Gerakan Demokratisasi Juni pada tahun 1987, yang diikuti oleh masyarakat di seluruh bagian Korea Selatan, sehingga akhirnya berhasil mengakhiri masa pemerintahan militer dan diadakannya pemilu secara langsung.¹⁴

Konflik domestik yang terjadi di Korea Selatan ini tentu saja tidak dapat diabaikan oleh Amerika Serikat, sebagai salah satu sekutu terdekat Korea Selatan yang memiliki pasukan militer di dalam dan keliling negara yang sedang berkonflik tersebut. Sebagai sekutu yang memiliki hubungan kerja sama militer yang dekat –mengingat kembali keberadaan dari Perjanjian Pertahanan Bersama 1953, keterlibatan Amerika Serikat dalam memadamkan pemberontakan, sebagai akibatnya, telah menjadi penyebab utama gerakan anti-Amerika muncul di tengah-tengah masyarakat. Demokrasi yang didambakan oleh warga sipil telah gagal didapatkan, dan Amerika Serikat dianggap turut bertanggung jawab dalam hal ini.¹⁵ Di saat peristiwa pemberontakan besar-besaran ini terjadi, pemerintahan Chun telah

¹³ Gwangju Metropolitan City. "Mei 18th Democratic Uprising." <https://www.gwangju.go.kr/eng/contentsView.do?pageId=eng9>. (Diakses 22 Februari, 2022)

¹⁴ Park Nak Chung. "Democracy and Peace in Korea Twenty Years After June 1987: Where Are We Now, and Where Do We Go from Here?" *The Asia-Pacific Journal* Vol. 5 No. 6 (June, 2007):1-9.

¹⁵ Jeffrey S. Robertson. "Anti-Americanism in South Korea and the Future of the U.S. Presence." *Journal of International and Area Studies* Vol. 9 No. 22 (2002): 87-103.

menggunakan unit komando gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memadamkan gerakan yang terjadi, dan walaupun untuk sekian lama AS mencoba untuk menyatakan klaim tidak bersalah mereka dengan beralasan bahwa peristiwa ini merupakan sebuah masalah internal dari Korea Selatan yang mana AS tidak memiliki hak untuk ikut campur, faktanya, pada tahun 1996, terungkap sebuah dokumen rahasia yang menyatakan kekhawatiran AS mengenai ketidakstabilan di Korea Selatan sehingga mereka lebih memilih untuk melanjutkan pemerintahan militer Chun daripada proses demokrasi yang tidak pasti. Pasca peristiwa ini sentimen anti-Amerika pun turut bertumbuh di Korea Selatan, tumbuh sebuah opini populer yang berpikir bahwa AS telah menginginkan dan mendukung rezim Chun untuk berkuasa, sehingga secara tidak langsung tumbuh sebuah ide bahwa AS memiliki afiliasi dalam peristiwa berdarah GwangJu.¹⁶

Seiring berjalannya waktu, sentimen Anti-Americanism di Korea Selatan kerap bermunculan di berbagai peristiwa. Memasuki abad ke 21, sentimen ini pun belum juga memudar. Protes terhadap kebijakan AS yang dianggap dapat memperkeruh hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara, serta keberadaan militer AS yang masih mendominasi tanah Korea Selatan masih menjadi isu utama, Banyak dari kalangan cendekiawan, pembuat kebijakan, serta media, yang menilai bahwa sentiment anti-Americanism ini dipicu oleh penolakan masyarakat terhadap otoritarianisme

¹⁶ Donald N. Clark. "U.S. Role in Kwangju and Beyond." <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1996-08-29-me-38742-story.html>. (Diakses 17 April, 2022)

dan kebangkitan nasionalisme. Keinginan masyarakat Korea Selatan untuk terbebas dari pengaruh AS pun masih terlihat hingga saat ini melalui demonstrasi penolakan masyarakat terhadap rencana latihan militer bersama antara AS dan Korea Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Biden. Pada akhirnya, kita dapat melihat bagaimana meningkatnya nasionalisme masyarakat Korea Selatan telah secara tidak langsung mendorong keberadaan sentimen anti-Americanism – yang pada dasarnya muncul karena dominasi AS terhadap Korea Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat bagaimana pasca keterlibatan Amerika Serikat di Gerakan Demokratisasi GwangJu 1980 telah semakin mengkristalisasi sentimen *anti-Americanism* - yang sebelumnya telah berakar di tengah masyarakat Korea Selatan, bahkan hingga tahun-tahun selanjutnya, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai apa saja keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa gerakan demokratisasi GwangJu serta bagaimana campur tangannya tersebut telah menyulut kembali dan menumbuhkan sentimen *anti-Americanism* di Korea Selatan. Selain itu, Penulis juga ingin melihat bagaimana perkembangan fenomena ini pasca peristiwa tersebut. Rumusan masalah tersebut pun akan disampaikan melalui dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pola fenomena *anti-Americanism* di Korea Selatan pada masa pemerintahan Chun Doo Hwan di tahun 1980-1987?

2. Bagaimana fenomena *anti-Americanism* yang sama tetap berlanjut dalam masa pemerintahan presiden Yoon Seok Yeol?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang keduanya masing-masing berusaha untuk menafsirkan bagaimana pola dari sentimen anti-Americanism di Korea Selatan, dan apa yang menjadi alasan utama sentiment tersebut hadir di tengah masyarakat Korea Selatan. Pertama, penelitian ini akan mencoba untuk memahami bagaimana awal dari kemunculan sentimen anti-Americanism di Korea Selatan, serta pola dan orientasi dari sentimen ini pada masa pemerintahan Chun Doo Hwan di tahun 1980 – terkhususnya pasca Gerakan demokratisasi Gwang ju 1980. Selain dari itu, penelitian ini juga akan berusaha untuk mengerti perubahan pola dari sentimen anti-Americanism ini yang masih hadir di masa pemerintahan Yoon Seok Yeol (2022), namun dalam corak atau orientasi yang berbeda.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Amerika Serikat menanggapi sebuah peristiwa yang notabeneanya merupakan "perjuangan untuk demokrasi" di negara yang merupakan salah satu sekutu terdekat dari Amerika Serikat sejak lama. Sebagai salah satu negara adidaya yang terkenal akan memperjuangkan demokrasi dan HAM, Amerika Serikat dinilai gagal dalam keterlibatannya di peristiwa gerakan

demokratisasi GwangJu 1980. Mengingat adanya untaian *anti-Americanism* yang sengit - yang telah berakar di Korea Selatan, Penelitian yang dilakukan akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan Amerika Serikat di peristiwa bersejarah Korea Selatan ini, telah "mengkristalisasi" dan berpengaruh terhadap perkembangan dari sentimen ini, sehingga harapannya, peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran - tidak hanya berguna untuk menganalisis kejadian-kejadian yang mungkin dapat terjadi di masa depan, tapi juga sebagai fungsi historis yang dapat mencegah kejadian serupa untuk terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bab pertama dari penelitian ini, akan dipaparkan latar belakang terkait topik penelitian beserta dengan rumusan masalah, yang sekaligus memberikan tujuan dan kegunaan bagi penelitian yang dilakukan.

Pada bab kedua – Kerangka Berpikir, dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari, pertama, tinjauan pustaka, yang merupakan proses meninjau pustaka pendahuluan berupa buku, jurnal, serta artikel jurnal yang dapat membantu dalam proses penelitian kedepannya. Kedua, teori dan konsep akan memaparkan berbagai konsep yang akan digunakan sebagai pedoman perspektif dalam usaha menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab ketiga akan berpusat pada metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai jenis penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pembahasan penelitian akan secara utama dibahas pada bab keempat. Pada bab ini, akan dibahas mengenai berbagai topik bersangkutan yang akan membantu penulis dalam mendapatkan jawaban untuk rumusan masalah penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup yang memberikan penegasan terkait jawaban untuk rumusan masalah penelitian, serta bagaimana teori dan konsep yang digunakan telah membantu dalam memberikan perspektif dalam menjawab pertanyaan penelitian.

